

# Limbah Cair Sawit Wajib Diolah Jadi Energi Terbarukan

Oleh **Damiana Simanjuntak**

► **PELALAWAN** – Pemerintah akan mewajibkan pabrik pengolahan minyak sawit mengolah limbah cair menjadi energi terbarukan mulai 2018. Ini dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penggunaan energi di Tanah Air tidak hanya menggantungkan pada minyak fosil. Saat ini, pemerintah merancang payung hukum berupa peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan (Permen LHK) untuk kebijakan tersebut.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pada Konferensi Perubahan Iklim COP-21 di Paris baru-baru ini, Indonesia menjadi bagian dari 200 negara di dunia yang ikut menyepakati upaya menjaga suhu bumi di bawah 2 derajat celsius atau di atas posisi sebelum era industri.

“Dengan adanya kesepakatan itu, Presiden Jokowi mengarahkan untuk melakukan reformasi subsidi dan melakukan penggunaan energi tidak hanya menggantungkan pada fosil dengan pengembangan energi terbarukan, di antaranya berbahan baku limbah cair sawit,” kata dia usai peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) milik Asian Agri di Ukui, Pelalawan, Riau, Sabtu (23/1).

Dia mengatakan, saat ini di Indonesia ada potensi limbah cair yang setara dengan 1,13 gigawatt (GW) listrik yang bisa dihasilkan dari limbah cair sawit (*palm oil mill effluent/ POME*). POME sebanyak itu dihasilkan dari sekitar 850-an pabrik minyak sawit di Indonesia. Saat ini, pemanfaatan limbah cair sawit di dalam negeri masih minim karena belum ada kewajiban. Alasannya, bagi sektor bisnis belum menguntungkan dan masih jauh dari kabel jaringan PLN.

“Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan, apalagi misalnya Sumatera misalnya, masih kekurangan listrik. Karena itu, pengolahan limbah cair sawit menjadi energi terbarukan akan diwajibkan mulai 2018. Jadi, balapan saja, industri mau memulainya dari sekarang atau nanti ditugaskan. Sekarang sedang disusun peraturannya, pemerintah menggunakan aspek lingkungan,” ungkap dia.



■ **Rida Mulyana**

Dia mengakui, pemerintah tidak bisa mengandalkan APBN untuk membangun pembangkit listrik. Untuk itu, pemerintah menarik minat investor. Salah satunya, melalui tarif yang diberlakukan untuk membeli listrik yang dihasilkan PLTBg, saat ini peraturan menteri ESDM (Permen ESDM) tentang tarif tersebut sudah terbit. Dengan peraturan itu, PLN tidak bisa bernegosiasi lagi, BUMN tersebut harus membeli energi sisa yang dihasilkan PLTBg milik industri.

“Investor mau masuk apabila menguntungkan. Menteri ESDM sudah mengundang para direksi PLN dan meminta mereka harus membeli energi terbarukan,” ungkap Rida.

Sementara bagi industri sawit, kata dia, ini adalah peluang bagus karena selama ini mereka disalahkan dan citranya jelek. Dengan memanfaatkan

limbah dan mengolahnya sebagai energi, sektor kelapa sawit di Indonesia telah berperan menjaga lingkungan. Saat ini, gas metana yang dihasilkan pabrik minyak sawit memiliki daya rusak 21 kali lebih jahat dibandingkan karbondioksida. Padahal, apabila diolah bisa dimanfaatkan untuk energi listrik, gas untuk bahan bakar rumah tangga, bahkan dengan bantuan teknologi bisa sebagai sumber air rumah tangga.

Secara terpisah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, rancangan aturan berupa Permen LHK yang mewajibkan industri sawit mengolah limbah cair sedang disiapkan. “Saya dan Menteri ESDM sudah sepakat untuk memulai energi terbarukan secepatnya,” kata Siti melalui pesan singkat.

## Apresiasi untuk Asian Agri

Sementara itu, pada Sabtu (23/1), Asian Agri mengoperasikan PLTBg yang kelima di Ukui, Pelalawan, Riau. Pada 2020, Asian Agri menargetkan membangun 20 unit PLTBg. Untuk membangun satu unit PLTBg dibutuhkan dana sekitar US\$ 4,7 juta. PLTBg tersebut mampu mengolah 60 ton POME per jam dan menghasilkan listrik sebesar 2 megawatt (MW). “Dalam hal ini, kami mengapresiasi langkah Asian Agri,” kata Rida Mulyana.

General Manager Asian Agri Freddy Widjaya mengatakan, langkah pemerintah yang mewajibkan pabrik minyak sawit mengolah limbah cair menjadi energi terbarukan sesuai dengan rencana Asian Agri yang telah menggiatkan investasi PLTBg secara mandiri. Dengan adanya wacana pemerintah mengharuskan PLN membeli sisa energi yang dihasilkan PLTBg perusahaan, PLTBg Asian Agri bisa memasok kebutuhan energi bagi pabrik dan masyarakat sekitar pabrik. “Kami sudah memiliki 5 unit PLTBg, yang baru diresmikan ini unit kelima. Tahun ini, kami akan membangun 2 unit lagi, kemungkinan di Riau. Pada 2020, kami menargetkan sudah terbangun 20 unit PLTBg,” kata Freddy.

Menurut Freddy, pihaknya sedang melakukan penajakan dengan PLN agar bisa menyalurkan energi sisa yang dihasilkan PLTBg. Diperkirakan, kebutuhan internal Asian Agri sekitar 20-25%, artinya masih ada 1,5 MW yang bisa disalurkan lewat PLN. “Dengan asumsi satu rumah tangga mengkonsumsi 900 watt, berarti 1,5 MW itu bisa memasok sekitar 1.500 rumah tangga. Prioritasnya masyarakat sekitar yang dekat,” kata Freddy.